

**Analisis kewajiban pemerintah kota samarinda
tahun anggaran 2011 - 2016**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

PUJI ULFATIN
NIM. 1001035560

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2017

ABSTRAK

Puji Ulfatin. **Analisis Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011-2016**. Dibimbing oleh: Ibu Dwi Risma Deviyanti dan Bapak Ibnu Abni Lahaya.

Kewajiban sering disebut juga hutang dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh pemerintah/perusahaan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah misalnya untuk membangun sarana dan prasarana publik dan lain lain. Barang dan jasa yang diperoleh pemerintah merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pemerintah pusat atau kepada pihak lain, untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya. Dua karakteristik yang penting dalam hutang adalah kewajiban tersebut sudah ada pada saat itu dan harus merupakan transaksi masa lalu, serta timbulnya hutang tergantung pada terjadinya suatu transaksi atau kejadian yang bersifat eksternal, seperti timbulnya kecelakaan yang menimbulkan kewajiban untuk mengganti suatu kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi neraca keuangan dan menganalisis kewajiban pemerintah kota yang meliputi analisis pertumbuhan utang, rasio utang perkapita, rasio utang terhadap ekuitas dana, rasio utang terhadap pajak daerah, rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, rasio utang terhadap total pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian diatas Analisis neraca pada kewajiban daerah, Pemerintah Kota Samarinda bias dikatakan kurang baik dalam pengelolaan keuangannya untuk mengatasi utang yang dimiliki. Dimana terlihat dari hasil pencapaian dari perhitungan – perhitungan baik dari pertumbuhan utang, rasio-rasio utang perkapita, terhadap ekuitas dana, pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah dan total pendapatan daerah terbilang baik berarti kinerja keuangan pemerintah Kota Samarinda cukup baik dalam mengatasi utang yang dimilikinya. Hanya saja pendapatan pajak daerah

belum mampu melunasi utang yang dimiliki pemerintah daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Untuk pendapatan asli daerah sebenarnya mengalami hal yang sama tetapi hanya terjadi ditahun 2012 artinya pemerintah Kota Samarinda semenjak saat itu sudah fokus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata kunci : laporan realisasi anggaran; rasio utang; pajak daerah

ABSTRACT

Puji Ulfatin. Analysis of **Obligation at Samarinda City Government Fiscal Year 2011-2016**. Guided by: Dwi Risma Deviyanti and Ibnu Abni Lahaya.

Obligations often referred to as debt in the simplest sense can be interpreted as financial obligations to be paid by the government to finance the various needs required by the government for example to build public facilities and infrastructure and others. Goods and services obtained by the government are transactions that may incur an obligation to pay to the central government or to other parties, to determine a transaction as a debt or not depends on the ability to interpret transactions or events that cause it. Two important characteristics of debt are those already existing and must be past transactions, as well as the incurrence of debt depending on the occurrence of an external transaction or occurrence, such as the occurrence of an accident which creates an obligation to replace a defect. The purpose of this study is to determine the condition of the balance sheet and analyze the obligation of municipal government which includes analysis of debt growth, debt ratio percapita, debt to equity ratio, debt to tax ratio, debt ratio to local revenue, debt ratio to total local revenue .

From the results of the above study Balance analysis on regional obligations, Samarinda City Government can be said to be less good in its financial management to overcome the debt held. Where seen from the achievement of the calculation - a good calculation of debt growth, perkapita debt ratios, to equity funds, local revenues, local tax revenues and total regional income fairly well means the financial performance of the government of Samarinda is quite good in overcoming its debt . It's just that the local tax revenues have not been able to pay off debts owned by local governments from 2011 to 2016. For the original revenue of the region actually mengalami same thing but only happened in 2012 means government of Samarinda since that time have been focus to increase earnings original area.

Keywords: budget realization report, debt ratio, local taxes.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kewajiban sering disebut juga hutang dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh pemerintah/perusahaan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah misalnya untuk membangun sarana dan prasarana publik dan lain lain. Barang dan jasa yang diperoleh

pemerintah merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pemerintah pusat atau kepada pihak lain, untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya, seperti yang dikemukakan oleh FASB berikut ini didalam *Statement of Financial Accounting Concept No. 6* yang terdapat pada buku Chairi dan Ghozali (2005:11), yaitu "hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang mendatang yang mungkin timbul dari kewajiban sekarang dari suary entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan ke entitas lain di masa mendatang sebagai akibat sebagai transaksi di masa lalu".

Lebih lanjut dari definisi yang dikemukakan di atas, pengertian kewajiban memiliki dua komponen utama yaitu :

- a. Adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa.
- b. Berasal dari transaksi atau peristiwa masa yang lalu (telah terjadi).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana Rasio Utang Pemerintah Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2011-2016

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Mengetahui dan Menganalisis Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011-2016 menggunakan Rasio Utang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam mengelola keuangan daerah.
- 2) Bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan memanfaatkannya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.

Tujuan dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu yang harus memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba. Tujuannya hanyalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Menurut Mahmudi (2010: 22), sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi:

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan kas;
- 2) Sistem dan prosedur pengeluaran kas.
- 3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas;

4) Sistem dan prosedur akuntansi aset

Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan pokok yang dibuat oleh pemerintah daerah meliputi:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 3) Laporan Arus Kas (LAK);
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CLK);
- 5) Lampiran Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi yang berlaku di instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi yang dimaksud berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi yang berlaku di instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi yang dimaksud berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Terbitnya PP 71 tahun 2010 merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai penggunaan laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila laporan keuangan disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM yang andal di bidang akuntansi, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di sektor pemerintahan. Akhirnya, agar pelaksanaan akuntansi basis akrual diperlukan beberapa persyaratan antara lain : (1) Sistem Akuntansi dan IT Based System termasuk sistem pengendalian intern yang andal, (2) Komitmen Pimpinan, dan (3) SDM yang memadai.

Ratio-ratio Keuangan Pemerintah

Dalam mengevaluasi kinerja akuntansi keuangan pemerintah, Sholeh dan Suropto (2011:75) dapat menggunakan ratio-ratio berikut:

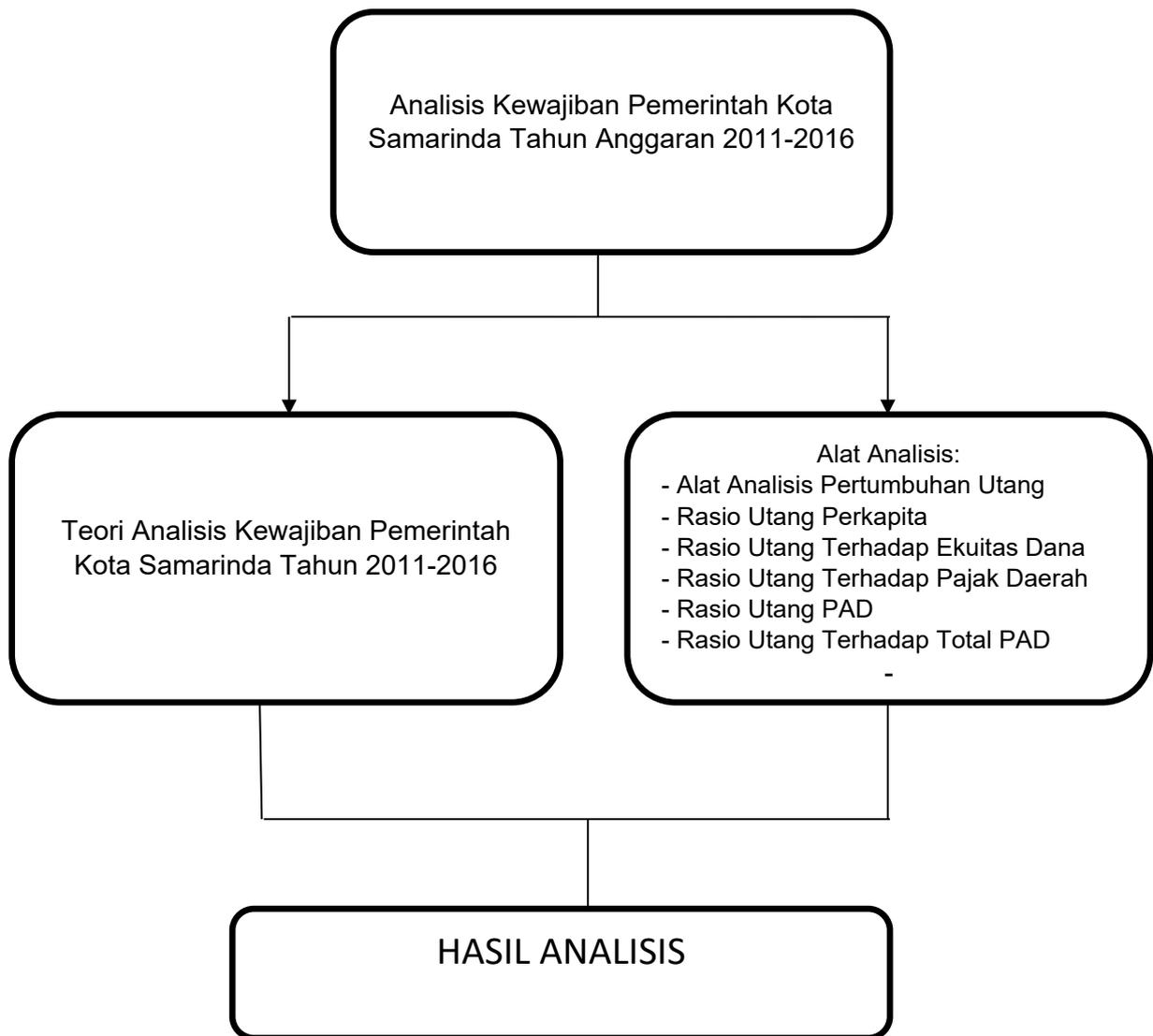
- 1) Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai pemerintah daerah dikalikan 100%. Ekuitas dana tersebut terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio kewajiban terhadap total aset, sehingga yang diukur

adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah sendiri dalam membiayai pembangunan.

- 2) Rasio kewajiban terhadap total aset/debt ratio dihitung dengan membandingkan total kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai pemerintah daerah dikalikan 100%. Analisis rasio ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur/ donator/ pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Norma penilaian menyatakan semakin kecil debt ratio, berarti semakin baik, artinya semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan atas kemampuan sendiri. Analisis rasio kewajiban terhadap total aset, seharusnya dihubungkan dengan Debt Service Ratio (DSR), yakni rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini, maka akan didapat rasio kewajiban terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.
- 3) Rasio kewajiban terhadap pendapatan/debt service ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman dengan total pendapatan. Yang dimaksudkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran kewajiban dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam tahun anggaran. Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan kewajiban. Pengalaman di Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga kewajiban/pinjaman dewasa ini dapat dijadikan standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal dapat baik, dan makin besar angka rasio, berarti semakin jelek kondisi keuangan pemerintah daerah).

- 4) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total realisasi pendapatan dikalikan 100%. Termasuk dalam PAD antara lain: pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian pendapatan dari lama perusahaan daerah, dan lain – lain PAD yang sah. Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan, berarti semakin besar kemampuan pemerintah daerah sendiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Apabila rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri. Sebaliknya semakin kecil rasionya, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Kerangka Pikir



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Utang yang dimaksud adalah sejumlah dana yang diperoleh pemerintah Kota Samarinda melalui proses pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu tertentu. Di dalam neraca utang ditetapkan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini ekuitas yang dimaksud dibagi menjadi tiga, yaitu 1) ekuitas dana lancar, 2) ekuitas dana investasi, dan 3) ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dana selainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Sementara itu, ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

Pendapatan Pajak adalah pendapatan dari Pajak Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Samarinda selama tahun pajak 2011 – 2016.

Penduduk yang dimaksud adalah penduduk Kota Samarinda selama tahun 2011 – 2016.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* dan *cross section*. Kajian eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang data yang diperoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. Data yang dijelaskan sebelumnya akan diuji dengan pendekatan kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- 1) Gambaran Umum tentang kota Samarinda
- 2) Data Demografi Kota Samarinda Tahun 2011-2016
- 3) Neraca Pemerintah Kota Samarinda selama periode 2011 – 2016.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam kajian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi : Mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada Biro Keuangan Pemerintah Kota Samarinda memperoleh bahan masukan yang menunjang penulisan skripsi ini
- 2) Dokumentasi : Mengambil data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011 – 2016.

Alat Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui metode deskriptif dan statistik (Mardiasmo, 2010: 118 – 124) yaitu :

Analisis Pertumbuhan Utang

PertumbuhanUtangJangkaPendek

$$= \frac{\text{Utang Jangka Pendek } t}{\text{Utang Jangka Pendek } t-1} \times 100\%$$

PertumbuhanUtangJangkaPanjang

$$= \frac{\text{Utang Jangka panjang } t}{\text{Utang Jangka Panjang } t-1} \times 100\%$$

Analisis Rasio Utang Per Kapita

$$\text{Rasio Utang PerKapita} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Jumlah Penduduk}}$$

Analisis Utang Terhadap Ekuitas Dana

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pajak

$$\text{Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}}$$

Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Utang terhadap PAD} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{PAD}}$$

Analisis Rasio Utang Terhadap Total pendapatan Daerah

RasioUtangterhadapTotal Pendapatan Daerah

$$= \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Samarinda

Sejarah Kota Samarinda

Samarinda yang dikenal sebagai kota seperti saat ini dulunya adalah salah satu wilayah kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Di wilayah tersebut belum ada

sebuah desa pun berdiri, apalagi kota. Sampai pertengahan abad ke-17 wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan beberapa penduduk. Pada tahun 1668, rombongan orang-orang Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona (bergelar Pua Ado) hijrah dari tanah kesultanan Gowa ke sultan Kutai.

Kedatangan orang-orang bugis wajo dari Kerajaan Gowa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai. Atas kesepakatan dan perjanjian, oleh Raja kutai rombongan tersebut diberikan lokasi sekitar kampong melantai, suatu daerah dataran rendah yang baik untuk usaha pertanian, perikanan dan perdagangan. Semua rombongan tersebut memilih daerah sekitar muara Karang Mumus (daerah selili seberang) tetapi daerah ini menimbulkan kesulitan didalam pelayaran karena daerah yang berarus putar (berulak) dengan banyak kotoran sungai. Selain itu dengan latar belkang gunung-gunung (Gunung selili).

Sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai Kartanegara memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di tanah rendah. Selain itu, Sultan yang dikenal bijaksana ini memang bermaksud memberikan tempat bagi masyarakat bugis yang mencari suaka ke Kutai akibat peperangan di daerah asal mereka.

Letak Geografis

Kota Samarinda terletak di Daerah Khatulistiwa, yaitu 0021' 18"-1009'16" Lintang Selatan dan 116015'16"-117024'16" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km², hal ini berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif lebih besar, Kota Samarinda juga memiliki keterbatasan ruang sebagai daya dukung lingkungan. Namun demikian sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan jasa, industri, perdagangan barang serta pemukiman yang berwawasan lingkungan.

Kependudukan

Ciri penting dari penduduk Kota Samarinda adalah kemajemukan serta pluar, baik dilihat dari pengelompokan agama, maupun adat istiadat, seni budaya dan suku. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan rendah.

Analisis Pertumbuhan Utang

Menurut Mahmudi (2010:116) Analisis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertumbuhan utang jangka pendek tahun 2011

$$= \frac{76.303.562.456,06}{349.146.811.567,06} \times 100\%$$

$$= 2,18 \%$$

Pertumbuhan utang jangka panjang tahun 2011

$$= \frac{833.874.287,68}{1.167.424.016,75} \times 100\%$$

$$= 71,4 \%$$

Pertumbuhan utang jangka pendek tahun 2012

$$= \frac{119.178.742.450,06}{76.303.562.456,06} \times 100\%$$

$$= 1,56 \%$$

Pertumbuhan utang jangka panjang tahun 2012

$$= \frac{500.324.578,60}{833.874.297,68} \times 100\%$$

$$= 60 \%$$

Pertumbuhan utang jangka pendek tahun 2013

$$= \frac{452.094.630.436,16}{119.178.742.450,06} \times 100\%$$

$$= 3,79 \%$$

Pertumbuhan utang jangka panjang tahun 2013

$$= \frac{166.774.859,54}{500.324.578,60} \times 100\%$$

$$= 33,3 \%$$

Pertumbuhan utang jangka pendek tahun 2014

$$= \frac{451.922.320.302,54}{452.094.630.436} \times 100\%$$

$$= 10 \%$$

Pertumbuhan Utang Jangka Panjang 2014

$$= \frac{104.366.954.002,00}{166.774.859,54} \times 100\%$$

$$= 62,5 \%$$

Pertumbuhan Utang Jangka Pendek 2015

$$= \frac{797.731.149.963,81}{451.922.320.302,54} \times 100\%$$

$$= 1,76$$

Pertumbuhan Utang Jangka Panjang 2015

$$= \frac{104.366.954.002,00}{104.366.954.002,00} \times 100\%$$

$$= 1 \%$$

Pertumbuhan Utang Jangka Pendek 2016

$$= \frac{562.453.611.456,45}{797.731.149.963,81} \times 100\%$$

$$= 7,05 \%$$

Pertumbuhan Utang Jangka Panjang 2016

$$= \frac{104.366.954.002,00}{104.366.002,00} \times 100\%$$

$$= 1\%$$

Rasio Utang Per Kapita

Rasio utang Perkapita tahun 2011

$$= \frac{77.137.436.762,74}{758.687} \times 100\%$$

$$= 101.672,2 \%$$

Rasio utang perkapita tahun 2012

$$= \frac{119.679.067.028,60}{781.313} \times 100\%$$

$$= 153.176,8 \%$$

Rasio utang perkapita tahun 2013

$$= \frac{452.261.405.295,70}{807.688} \times 100\%$$

$$= 559.947 \%$$

Rasio utang perkapita tahun 2014

$$= \frac{556.289.274.304,54}{885.356} \times 100\%$$

$$= 628.322,7 \%$$

Rasio utang perkapita tahun 2015

$$= \frac{902.098.103.965,81}{927.422} \times 100\%$$

$$= 972.694.3 \%$$

Rasio utang perkapita tahun 2016

$$= \frac{666.820.565.458,45}{998.583} \times 100\%$$

$$= 667.748,7 \%$$

Rasio Utang Terhadap Ekuitas Dana

Rasio utang terhadap ekuitas dana tahun 2011

$$= \frac{77.137.436.762,74}{6.956.115.079,87} \times 100\%$$

$$= 11,08 \%$$

Rasio utang terhadap ekuitas dana tahun 2012

$$= \frac{119.679.067.028,66}{8.779.884.231.908,86} \times 100\%$$

$$= 1,36 \%$$

Rasio utang terhadap ekuitas dana tahun 2013

$$= \frac{452.094.630.436,16}{10.028.416.857,13} \times 100\%$$

$$= 4,50 \%$$

Rasio utang terhadap ekuitas dana tahun 2014

$$= \frac{556.289.274.304,54}{11.662.460.590.285,00} \times 100\%$$

$$= 4,76 \%$$

Rasio utang terhadap ekuitas dana tahun 2015

$$= \frac{902.098.103.965,80}{10.871.348.566.965,80} \times 100\%$$

$$= 8,29 \%$$

Rasio utang terhadap ekuitas dana tahun 2016

$$= \frac{666.820.565.458,45}{11.176.165.511.735,00} \times 100$$

$$= 5,96 \%$$

Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah

Rasio utang terhadap pajak daerah tahun 2011

$$= \frac{77.137.436.762,74}{109.428.925.935,39} \times 100\%$$

$$= 7,34 \%$$

Rasio utang terhadap pajak daerah tahun 2012

$$= \frac{500.324.578,60}{159.827.940.802,66} \times 100\%$$

$$= 3,10 \%$$

Rasio utang terhadap pajak daerah tahun 2013

$$= \frac{166.774.859,54}{197.814.938.240,07} \times 100\%$$

$$= 8,21 \%$$

Rasio utang terhadap pajak daerah tahun 2014

$$= \frac{104.366.954.002,00}{238.511.683.138,63} \times 100\%$$

$$= 4,03 \%$$

Rasio utang terhadap pajak daerah tahun 2015

$$= \frac{104.366.954.002,00}{244.079.216.597,34} \times 100\%$$

$$= 4,02 \%$$

Rasio utang terhadap pajak daerah tahun 2016

$$= \frac{666.820.565.458,45}{256.130.052.909,60} \times 100\%$$

$$= 2,60 \%$$

Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio utang terhadap pendapatan asli daerah tahun 2011

$$= \frac{77.137.436.762,74}{23.502.055.734,12} \times 100\%$$

$$= 3,28 \%$$

Rasio utang terhadap pendapatan asli daerah tahun 2012

$$= \frac{500.324.578,60}{50.835.480.825,91} \times 100\%$$

$$= 0,98 \%$$

Rasio utang terhadap pendapatan asli daerah tahun 2013

$$= \frac{166.774.859,54}{78.952.990.584,69} \times 100 \%$$

$$= 0,21 \%$$

Rasio utang terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014

$$= \frac{104.366.954.002,00}{124.983.014.105,03} \times 100\%$$

$$= 0,83\%$$

Rasio utang terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015

$$= \frac{104.366.954.002,00}{109.066.493.311,87} \times 100\%$$

$$= 0.95\%$$

Rasio utang terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016

$$= \frac{666.820.565.458,45}{72.322.556.867,35} \times 100\%$$

$$= 9,22 \%$$

Rasio Utang Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah

Rasio utang terhadap total PAD tahun 2011

$$= \frac{77.137.436.762,74}{188.813.379.533,48} \times 100\%$$

$$= 4,08 \%$$

Rasio utang terhadap total PAD tahun 2012

$$= \frac{500.324.578,60}{273.741.456.947,69} \times 100\%$$

$$= 0.18 \%$$

Rasio utang terhadap total PAD tahun 2013

$$= \frac{166.774.859,54}{338.158.272.078,65} \times 100\%$$

= 0.04 %

Rasio utang terhadap PAD tahun 2014

$$= \frac{104.366.954.002,00}{435.498.980.673,66} \times 100\%$$

= 0,23

Rasio utang terhadap PAD tahun 2015

$$= \frac{104.366.954.002,00}{419.745.787.641,81} \times 100\%$$

= 0,02 %

Rasio utang terhadap PAD tahun 2016

$$= \frac{666.820.565.458,45}{391.404.293.290,97} \times 100\%$$

= 1,70 %

Pembahasan Hasil Analisis

Tabel 4.3. Data Hasil Analisis Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011 – 2016.

Keterangan	Tahun						Penilaian					
							Naik / Turun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Analisis Kewajiban							Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik
1. Analisis Utang Per Kapita	101.672,2%	153.1.876%	559.95%	628.322,7%	972.694,3%	667.748,7%	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik
2. Rasio Utang Terhadap Ekuitas Dana	11,08%	1,36%	4,50%	4,76%	8,29%	5,96%	Naik	Turun	Naik	Naik	Naik	Turun
3. Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah	7,34%	3,10%	8,21%	4,03%	4,02%	2,60%	Naik	Turun	Naik	Turun	Turun	Turun
4. Rasio Utang Terhadap PAD	3,28%	0,98%	0,21%	0,83%	0,95%	9,22%	Naik	Turun	Turun	Turun	Turun	Naik
5. Rasio Utang Terhadap Total pendapatan Daerah	4,08%	0,18%	0,04%	0,23%	0,02%	1,70%	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6. Analisis Pertumbuhan Utang												
Analisis Pertumbuhan Utang												
1. Utang Jangka Panjang	71,4%	60%	3,33%	62,5%	1%	1%	Naik	Turun	Naik	Naik	Turun	-
2. Utang Jangka Pendek	2,18%	1,56%	3,79%	10%	1,76%	7,05%	Naik	Turun	Naik	Naik	Turun	-

Sumber : Data Hasil Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan Pembahasan pada bab sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tergolong baik. Jika dilihat dari Analisis kewajiban dalam melunasi hutang - hutang Kota Samarinda.

1. Analisis neraca pada pertumbuhan utang Pemerintah kota Samarinda bisa dikatakan baik walaupun selalu berfluktuasi dalam pengelolaan keuangan untuk mengatasi utang yang dimiliki. Walau belum mampu melunasi seluruh hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek tetapi hutang Pemerintah Kota bisa dikatakan masih pada tahap wajar
2. Analisis utang perkapita Pemerintah Kota Samarinda terbilang baik, dilihat dari hasil pencapaian angka yang naik turun sesungguhnya utang yang di tanggung oleh masarakan masih dalam tahap wajar.
3. Analisis utang terhadap ekuitas dana Pemerintah Kota Samarinda terbilang mengalami tergantung terhadap pembiayaan utang, namun masi dalam tahap wajar dan tidak membebani keuangan Pemerintah.
4. Analisis Utang terhadap pajak daerah Pemerintah Kota Samarinda bisa dikatakan belum mampu untuk melunasi utang Pemerintah, yang menyebabkan sangat kecil anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah untuk sup pos pendapatan pajak daerah.
5. Analisis utang terhadap pendapatan asli daerah belum mampu melunasi utang yang dimiliki oleh pemerintah namun dilihat dari angka pencapaian Pemerintah sudah focus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga di beberapa tahun mengalami peningkatan yang baik.
6. Analisis utang terhadap total pendapatan asli daerah belum mampu melunasi utang pemerintah daerah dari tahun 2011-2016
- 7.

Saran

Dengan adanya perhitungan analisis neraca pada kewajiban daerah yang dianalisis, kontribusi pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat dikurangi dan diminimalisir

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Bahrn., 2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra., 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Girsang, Heri Atapson V., 2015. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). *Skripsi*. Fakultas Ekonomik dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Halim Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Salemba Empat Jakarta
- Mardiasmo., 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mahmudi., 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugeha, Fiqih, Fez; Herman Karamoy, Rudy J. Pusung., 2015. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013
- Peraturan pemerintah No, 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Sholeh, Chabib dan Suropto, 2011, *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*.: Fokus media, Bandung. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Weston, J.F dan Thomas E. Copeland., 2010. *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi. Binarupa Aksara, Tangerang.